

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Ardiansyah, *Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum di Ruang Publik*, Deepublish, Yogyakarta, 2022.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kompendium Bidang Hukum Administrasi*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2020.
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Rafika, Jakarta, 2002.
- Indroharto, dalam Paulus Efendie Lolutung (ed), *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Kadar Pamuji, dkk, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, UNSOED Press, Purwokerto, 2023.
- Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Kusnardi, M., & Saragih, B. R., *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2018.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintah*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- M. Ali, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, 2021.
- M. Galang Asmar, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2025.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021.
- _____, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.

- Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012.
- _____, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017.
- Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, dan T. S. N. J. Koestanti Handoyo, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Edisi ke-10*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), Jakarta, 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.
- Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet Ke-4, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1990.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2019.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-14, Alfabeta, Bandung, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.

Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

C. Jurnal

Abdul Halim, dkk, Diskualifikasi Kepala Daerah Terpilih Akibat Ijazah Palsu: Studi Kasus Pilkada Pesawaran 2024, *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, ITTC INDONESIA, Vol. 02 No. 04 Edisi April-Juni 2025.

Ahmad Gelora Mahardika, Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Terpilih Serta Penyelesaiannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 3 No. 1, November 2021.

Budiman N.P.D. Sinaga, Johnson Pasaribu & Jherry Napitupulu, "Pelanggaran Administrasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

- dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020”, *Visi Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 1, Juni 2021.
- Feri Amsari, dkk, “Laporan Penelitian Malpraktik Penyelenggaraan Pilkada 2024 dan Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Yayasan Dewi Keadilan Indonesia&Themis Indonesia Law Firm*, 2025.
- L. Zuhri, “Persyaratan Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada 2024, Terkait Konflik Norma Dan Nilai Dalam Putusan MA Dan Putusan MK”, *Proceedings APHTN/HAN*, Vol. 2 No. 1, 2024.
- Maudina Dwiastuti, Penyebab dan Implikasi Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek, *Jurnal Suara Politik*, Vol. 4 No. 1 Juni 2025.
- Metrina Tosika, “Tinjauan Yuridis Klarifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Calon pada Pilkada Serentak Tahun 2024”, *Jurnal TKP*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Muslim A. Kasim dan Moh Arief Erawan, Fenomena Ijazah Palsu dalam Pemilu Kepala Daerah dan Dampaknya terhadap Demokrasi Konstitusional, *GJR: Gorontalo Justice Research*, Vol 1, No 1, April Tahun 2025.
- Prayudi, Kajian Policy Brief, Pemungutan Suara Ulang sebagai Konsekuensi Pelanggaran Pilkada 2024, *Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XXX No.3 2025.
- Vicky Zaynul Firmansyah, Firdaus Syam, “Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia”, *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7 (2).
- Yustika Fitri Agustine, "Diskualifikasi Kepala Daerah Terpilih Akibat Ijazah Palsu," *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Sosial Politik* 5, No. 1, 2025.

D. Internet

- Antara, diakses pada 15 Januari 2026, ([KPU koordinasi dengan Kemendagri soal biaya PSU Pilkada 2024, \(antaranews.com\)](#)).
- Kompas, diakses pada 15 Januari 2026, ([Ratusan Miliar APBD Harus Hilang untuk Pemungutan Suara Ulang \(nasional.kompas.com\)](#)).
- Kompas.id, diakses pada 31 Januari 2026, (Sengkarut Dokumen Pencalonan Berujung Diskualifikasi Pasangan Calon Pilkada 2024, (kompas.id)).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses pada 16 Januari 2026, ([Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah \(mkri.id\)](#)).
- Ombudsman Republik Indonesia, diakses pada 15 Januari 2026, ([Mengawasi Potensi Maladministrasi Pada Pemilukada, \(ombudsman.go.id\)](#)).
- Perludem, diakses pada 15 Januari 2026, ([Konsekuensi Pemungutan Suara Ulang: Beban Anggaran dan Cermin Buruk Kinerja Penyelenggara \(perludem.or.id\)](#)).

Tim Peneliti Perludem, diakses pada 15 Januari 2026, ([Analisis Putusan PHP-Kada 2025, Pertimbangan Hukum, PSU dan Koreksi Pelaksanaan Pilkada 2024 \(perludem.or.id\)](#)).

